

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, seluruh daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing setiap daerah dan daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana prinsip otonomi daerah, dimana daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi dengan sedikit rasa khawatir dan was-was. Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat didaerah, (Mardiasmo, 2004: 139).

Darise (2009: 128) mengungkapkan bahwa dalam proses Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan publik yang baik dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah.

Menurut Kuncoro dalam Ardhani (2011: 11) bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan semakin meningkat merupakan suatu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan. Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas perekonomian

agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (BPS dalam Arwanti dan Hadiati, 2013).

Untuk mensukseskan anggaran pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Tujuan transfer dana dari pusat tersebut untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana perimbangan dapat berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil (Darise, 2009: 77).

Darise (2008: 139) mengungkapkan belanja pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Salah satu dari belanja langsung adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai mamfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Pertumbuhan ekonomi (dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto), dana perimbangan dan belanja modal Kabupaten Pohuwato selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1: Rekapitulasi Pertumbuhan Ekonomi, Dana perimbangan dan Belanja Modal Kabupaten Pohuwato T.A 2008 s/d 2012**

N O	TAHUN ANGGARAN	PDRB (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	BELANJA MODAL (RP)
1	2008	452.559.000	335.155.483.942,00	141.261.405.390,00
2	2009	484.958.000	342.951.989.191,00	128.081.368.715,00
3	2010	521.089.000	325.077.171.666,00	100.581.604.060,00
4	2011	558.689.000	350.675.147.316,00	112.524.679.479,00
5	2012	601.177.000	406.005.000.000,00	88.347.579.158,00

Sumber: djpk.go.id

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan keadaan belanja modal di Kabupaten Pohuwato masih fluktuatif dan ini salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan belanja modal di Kabupaten Pohuwato. Fluktuatifnya belanja modal disinyalir karena alokasi pada pos belanja-belanja yang lain lebih ditingkatkan. Hal ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato yang terus mengalami peningkatan, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka belanja modal suatu daerahpun akan terus meningkat. Namun kenyataan yang terjadi dalam pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah belanja modalnya yang fluktuatif.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa dana perimbangan Kabupaten Pohuwato terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Pohuwato masih bergantung pada Dana Perimbangan. Dana perimbangan dari pusat digunakan untuk menambah aset tetap pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik, oleh karena itu dana perimbangan dapat mempengaruhi belanja modal suatu daerah. Dengan demikian dana perimbangan yang terus meningkat juga akan meningkatkan belanja modal suatu daerah tapi kenyataannya belanja modal kabupaten Pohuwato masih fluktuatif.

Belanja modal merupakan belanja untuk pembangunan dalam rangka pelayanan publik, namun fenomena yang peneliti dapatkan di Kabupaten Pohuwato bahwa sarana dan prasarana untuk pelayanan publik di Kabupaten Pohuwato masih kurang memadai. Dapat dilihat dari akses jalan-jalan yang di Kabupaten Pohuwato terdapat sebagian jalan rusak, kurangnya perbaikan dan perhatian pemerintah kabupaten pohuwato terhadap potensi daerah misalnya pariwisata yang dapat menopang dan meningkatkan pendapatan dari daerah. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan dana perimbangan yang terus meningkat tidak berbanding lurus dengan pembangunan daerah di Kabupaten Pohuwato.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro (2010) yang berjudul Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, terhadap belanja

modal. (Study kasus pada kabupaten di Jawa Tengah). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arwanti dan Hadiati (2013) yang berjudul Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, namun Pertumbuhan ekonomi dan Dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai pengaruh dari Pertumbuhan ekonomi dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Pohuwato dimana judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Pohuwato”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan fenomena sarana dan prasarana untuk pelayanan publik di Kabupaten Pohuwato masih kurang memadai. Dapat dilihat dari akses jalan-jalan yang di Kabupaten Pohuwato terdapat sebagian jalan

rusak, kurangnya perbaikan dan perhatian pemerintah kabupaten pohuwato terhadap potensi daerah misalnya pariwisata yang dapat menopang dan meningkatkan pendapatan dari daerah.

2. Ketergantungan pemerintah Kabupaten Pohuwato terhadap dana perimbangan sangat besar dalam membiayai belanja pembangunan termasuk didalamnya Belanja Modal.
3. Belanja modal kabupaten pohuwato dari tahun 2008 sampai tahun 2012 terus menurun sementara pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Pohuwato?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Pohuwato?
3. Apakah Pertumbuhan ekonomi dan Dana Perimbangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Pohuwato?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja modal di Kabupaten Pohuwato.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan terhadap belanja modal di Kabupaten Pohuwato.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun mamfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai faktor yang mempengaruhi belanja modal di Kabupaten Pohuwato. Serta penelitian dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak lain yang akan tertarik akan masalah yang di angkat untuk diteliti lebih lanjut.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato.